

LAPORAN PPID ACEH

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT , atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Tahun Anggaran 2014 telah berjalan dengan baik sesuai beban tugas yang diberikan.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam UU 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi serta Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dan Keputusan Gubernur nomor 335/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Laporan ini merupakan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama yang bersumber dari DPA Tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh, selama tahun anggaran berjalan.

Percepatan dan pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu dilingkungan SKPA serta PPID Kabupaten /Kota telah diapresiasi oleh masyarakat dengan baik, apalagi adanya pelayanan informasi satu pintu sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari dan mengakses informasi tentang berbagai hal yang ingin diketahui oleh masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Aceh. Pelayanan informasi publik ini dilaksanakan selain perintah UU KIP juga sejalan dengan tupoksi Dinas/lembaga yang membidangi komunikasi publik dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi informasi dan Telematika Aceh. yang salah satu tupoksinya adalah melaksanakan diseminasi informasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui optimalisasi peran media Media Center Aceh yang ada di UPTD Seuramoe Informasi Aceh.

Pelayanan informasi publik di PPID Aceh disamping dilakukan secara langsung pada desk layanan informasi, juga dilakukan dengan penyediaan informasi secara online yaitu melalui aplikasi data base “ppid.acehprov.go.id, dan “acehprov.go.id”

Selanjutnya penyebaran informasi dilingkungan Pemerintah Aceh juga disajikan dalam bentuk publikasi melalui Website *Info Publik.org*, *Kominfo RI*, *Seuramoe.acehprov.go.id*, *tabloid Seuramoe Informasi* dan media elektronik, cetak dan media luar ruang lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk seperlunya. Terimakasih.

Banda Aceh, 24 Desember 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINTEL ACEH
Selaku,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh
Ir. RIZAL ASWANDI, SE, Dpl
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19600327 198811 1 001

DASAR HUKUM

- UUD 1945 Pasal 28 huruf, (F), *“Setiap orang berhak utk berkomunikasi dan memperoleh informasi utk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosia, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dgn menggunakan segala jenis saluran yg tersedia”*.
- UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 tentang penunjukan PPID di badan Publik, Pasal 9, 10, 11 tentang kewajiban badan publik utk menyediakan informasi
- PP 61 tentang pelaksanaan UU 14/2008, pasal 12, ayat 1, *Pejabat PPID dapat ditunjuk adalah badan Publik yang berkedudukan di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.*
- Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi

- **Permendagri No. 35 tahun 2010** tentang Manlak PPID
- **Pergub No. 39 Tahun 2012** Manlak PPID dilingkungan Pemerintah Aceh
- ▶ **Keputusan Gubernur No. 335 Thn 2012** tentang Penetapan PPID
- ▶ **Keputusan PPID No. 065/904/2013** tentang SOP PPID dilingkungan Pemerintah Aceh
- ▶ **Surat Kemendagri No. 188.2/7266/SJ/2013**, tentang percepatan Pembentukan dan Penguatan kelembagaan PPID Provinsi dan Kab/kota.
- ▶ **Surat Kemendagri No.700/3057/V/bangda/2014**
Tggl 3 April 2014 tentang pelaksanaan RAD-PPK yg semula 7 recana aksi menjadi 8 rencana aksi yaitu peran dan tugas Pokok PPID Utama dan Pembantu

Kewajiban Badan Publik

- Menyiapkan Regulasi bidang Pelayanan, Pergub/Perbub/Perwal.
- Mengeluarkan Keputusan Pimpinan badan Publik tentang Organisasi dan PPID
- Mengeluarkan Keputusan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik, yg tersedia setiap saat, berkala, serta merta, dan dikecualikan.
- Menyiapkan Tata cara/ mekanisme pelayanan (SOP)
- Menyiapkan Desk Layanan, sar-pras, serta penganggaran
- Melakukan Pengembangan Pelayanan Informasi melalui TI

Tugas dan Wewenang PPID Utama

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan DIP dari PPID Pembantu.
- Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan(atasan PPID) dan PPID Pembantu
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja dilingkungan Pemerintah Aceh
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu. (sesuai perki NO.1 /2010)
- Melakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan PPID Kab/Kota.
- Membuat laporan pelayanan informasi minimal kepada atasan PPID, KIA, dan Komisi Informasi Pusat, Kemendagri dan Kominfo RI

Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

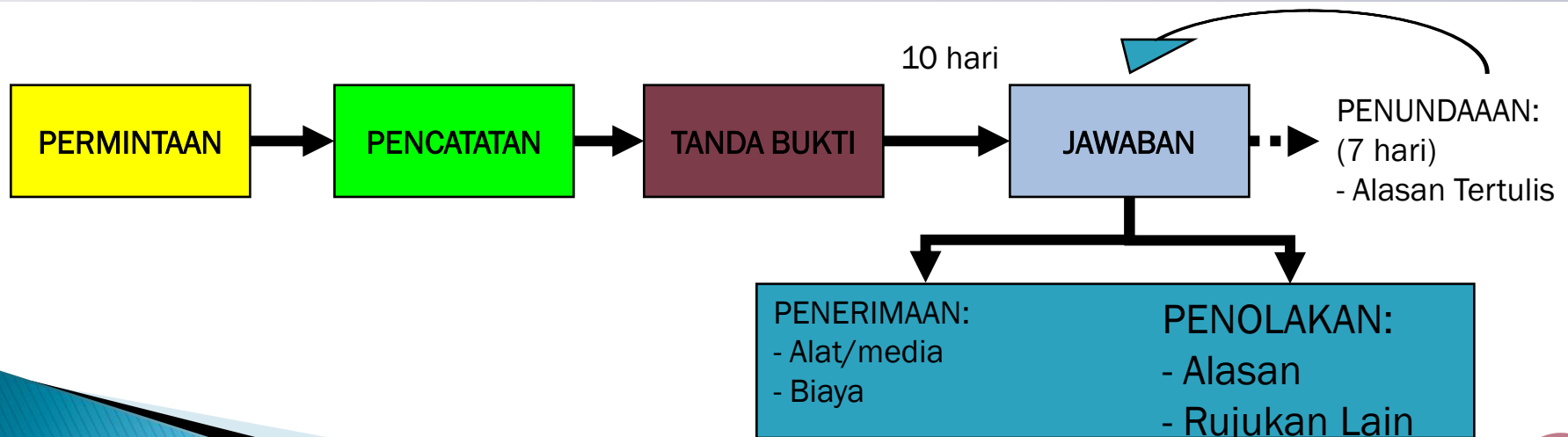
- Menetapkan Tim Pengelola Informasi yg dibantu oleh tenaga fungsional ; Adm, arsiparis, Pustakawan pranata humas dan pranata komputer (klu ada) klu tdk berdayakan pns yg ada
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi (DIP) dari Unit Kerja.
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- Berkewenangan memberikan pelayanan informasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit Kerja.
- Membuat dan mengirim laporan ke PPID Utama dan KIA , Komisi Informasi Pusat/triwulan / semesteran/tahun.

Prosedur Permohonan Informasi di PPID Aceh

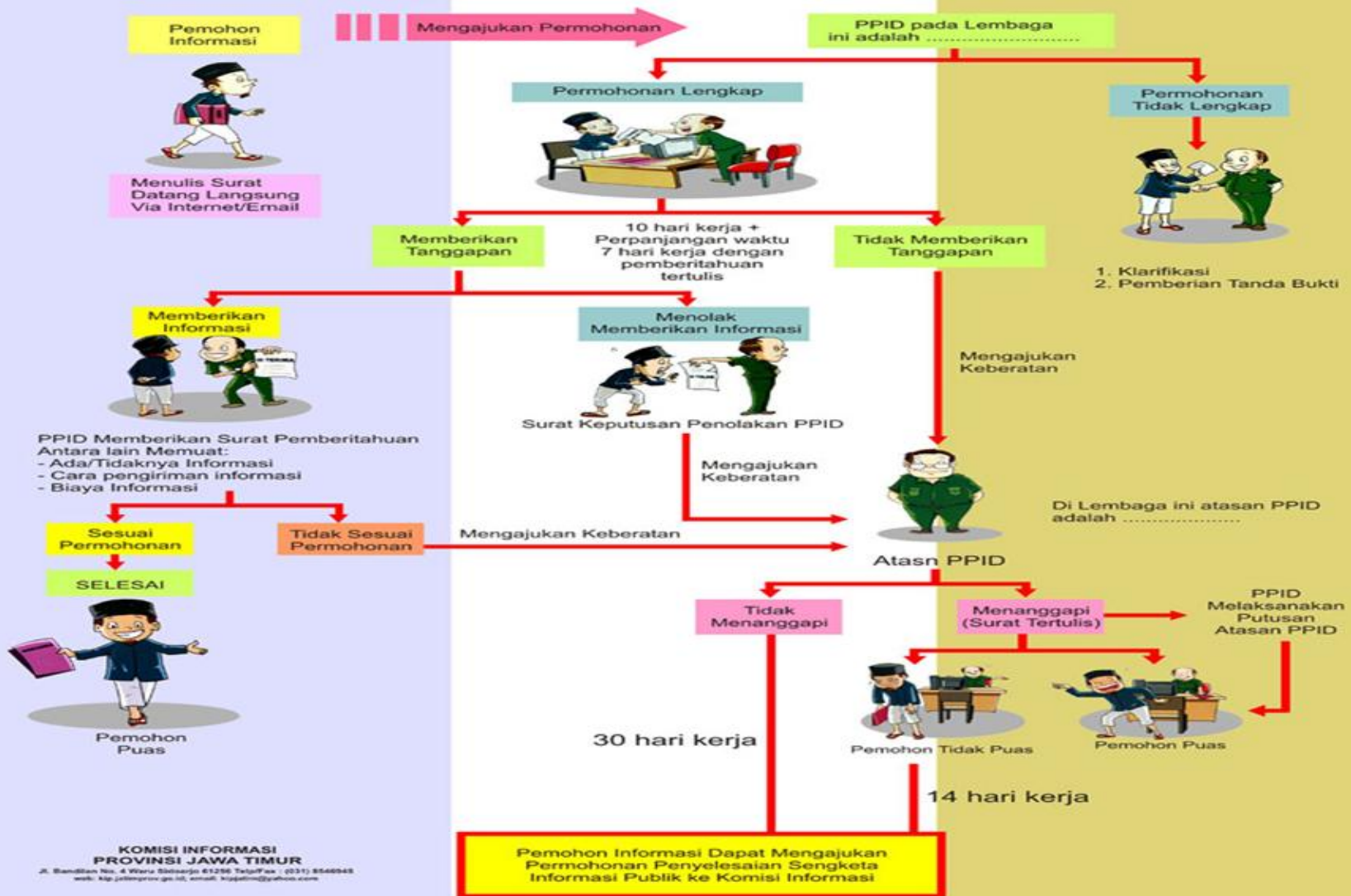
1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi **Formulir Keberatan Informasi**, baik langsung atau online di pusat layanan.
2. Formulir Keberatan ditujukan kepada atasan PPID.
3. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta **meregister** FKI tersebut.
4. PPID Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas teknis terkait atau **PPID Pembantu di SKPA** untuk menyiapkan tanggapan terhadap **keberatan informasi** dimaksud.
5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi yang telah dikordinasi dengan pihak terkait diserahkan/ dikirim oleh PPID /PPID Pembantu , kepada pengaju keberatan informasi

SKEMA TATA CARA PEROLEHAN INFORMASI

- ▶ Prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
- ▶ Mengajukan permintaan tertulis/tidak tertulis
- ▶ Jawaban dari Badan Publik (paling lambat 10 hari + 7 hari kerja)



ALUR PERMOHONAN INFORMASI



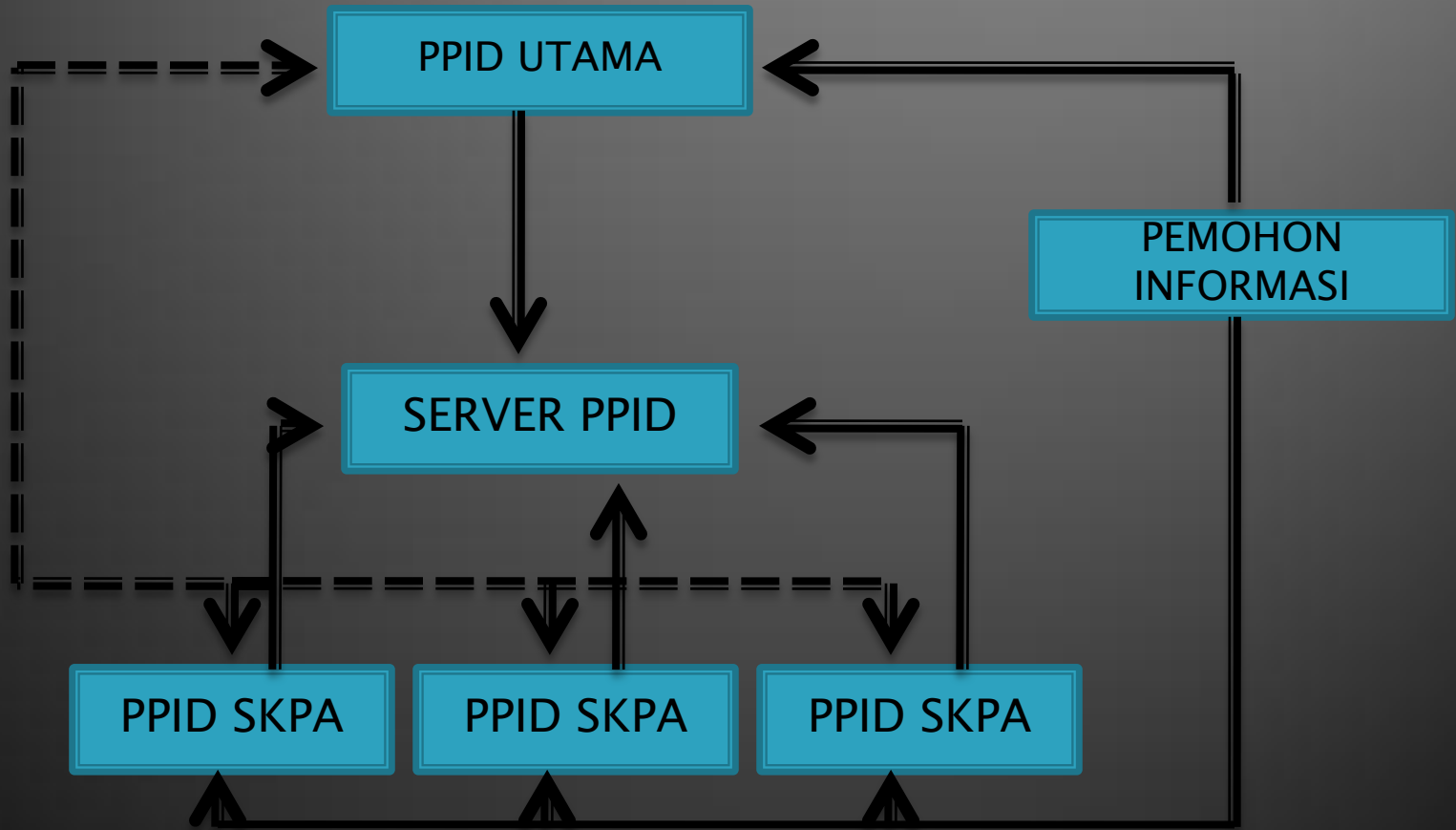
Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi **Formulir Keberatan Informasi**, baik langsung atau online di pusat layanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta **meregister** FKI tersebut.
3. Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID.
4. PPID Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau **PPID Pembantu di SKPA** untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap **keberatan informasi** dimaksud.
5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/ dikirim oleh PPID /PPID Pembantu , kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.

Sarana dan prasarana PLI di PPID Aceh

- Pusat Layanan Informasi dan Sekretariat PPID Aceh berada di UPTD Seuramoe Informasi Dishubkomintel Aceh Jl. STA. Mahmudsyah No. 14 Banda Aceh – 0651–33615
- Fasilitas Media Center berbasis internet Gratis untuk Publik
- Fasilitas Website, Aplikasi Data base, “ppid.acehprov.go.id” “acehprov.go.id” Portal “seuramoe.acehprov.go.id”, portal info pubik.org (kominfo RI yg dpt link ke UPK4) dan Tabloid Seuramoe Informasi.

SKEMA APLIKASI DATA BASE PPID ACEH



----- Koordinasi

KEGIATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN PPID TAHUN 2014

- 1. Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi PPID SKPA dan Kab/Kota**
- 2. Forum Diskusi Percepatan Pembentukan PPID Kab/Kota**
- 3. Bimtek Reportase Bagi MC Dan PPID Kab/Kota**
- 4. Sosialisasi Bagi PPID Kab / Kota**
- 5. Rakornis Untuk PPID**
- 6. Rakornis PPID se-Aceh**
- 7. Forum PPID se-Aceh Secara Reguler 3 Bulanan**
- 8. Evaluasi Oleh Kia Kepada SKPA dan Kab/Kota**
- 9. Membuat Film Tutorial Pelayanan Informasi PPID**
- 10. Pengembangan Aplikasi PPID Aceh**

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN PPID TAHUN 2014

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH PAGU	SUMBER ANGGARAN	PENYELENGGARA	TANGGAL	PEMBICARA/NARA SUMBER	TPT KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forum Pemberdayaan PPID Kab/Kota	-	Kinerja-USAID	PPID Utama/PPID Kota B.Aceh/Kinerja-USAID	03 Maret 2014	-PPID Aceh -KIA, Kinerja	Banda Aceh	45
2	Forum Pemberdayaan PPID Kab/Kota	-	Kinerja-USAID	PPID Utama/PPID A. Tengah / Kinerja-USAID	19-Jun-14	-PPID Aceh -KIA, Kinerja	Takengon	45
3	Forum Pemberdayaan PPID Kab/Kota	-	Kinerja-USAID	PPID Utama/PPID A. Tengah / Kinerja-USAID	18-Sep-14	-PPID Aceh -KIA, Kinerja	Aceh Selatan	45
4	Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID Kab/Kota	100.000.000,-	APBA/Kinerja-USAID	UPTD Seuramoe Informasi/ Kinerja USAID	12 s/d 14 Mei 2014	-PPID Aceh -KIA, Kinerja	Banda Aceh	60
5	Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID di Lingkungan SKPA	69.800.000,-	APBA/Kinerja-USAID	UPTD Seuramoe Informasi	12 s/d 14 Agustus 2014	-PPID Aceh -KIA, Kinerja	Banda Aceh	60
6	Bimtek Reportase Online Bagi Pengelola MC dan PPID Kab/Kota	100.000.000,-	APBA	UPTD Seuramoe Informasi	14 s/d 16 Sept 2014	-PWI, Serambi - Aji TVRI - MC Aceh	Banda Aceh	60
7	Forum Pemberdayaan PPID Kab/Kota	-	Kinerja-USAID	PPID Utama/PPID A.Selatan / Kinerja-USAID	17-Sep-14	-PPID Aceh -KIA - PPID Banda Aceh	A. Selatan	45
8	Rakornis Penguatan Kelembagaan Kab/Kota se-Aceh	113.150.000,-	APBA/Kinerja-USAID	UPTD Seuramoe Informasi / Kinerja	November 2014	- PPID Aceh - KIA, Kinerja - PPID Banda Aceh	Banda Aceh	60
9	FGD Penguatan Kelembagaan PPID di 15 Kab/Kota	85.000.000,-	APBA	UPTD Seuramoe Informasi	Maret s/d Nov 2014	- Bupati, Wali Kota, SKPA dan Stakholder Kab/Kota	15 kab/Kota (sesuai lampiran)	150

Kondisi PPID Pembantu dilingkungan SKPA tahun 2014

NO	NAMA DINAS	SK TIM PPID Pembantu	Tanggal SK	DIP	IP MELALU I WEBSITE	WEBSITE	PENANGGUNG JAWAB PPID/Koord.Pely	NO.KONTAK PERSON	KET
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh	555/49.1/SK/2013	01 Juli 2013	-	Sudah	Dishubkomintel.acehprov.go.id	Ir. Rizal Aswandi, Dpl.SE Drs. Erizal	0651-22110 081360084597	
2	Inspektorat Aceh	700/B.II/868/IA	02 Oktober 2013	-			Abdullah, S.Sos	Telp : 0651-7551400 Telp : 0651-7551413	
3	Rumah sakit Ibu dan Anak	602.1/084/2013	10 Oktober 2013	-		Rsia.acehprov.go.id	dr. Rusdi Andit, S.PA	Telp : 0651-637433	
4	Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh	473.1/262/SK/2013	07 November 2013	-		Satpolppwh.acehprov.go.id	T. Armansyah	Telp : 0651-28854	
5	Sekretariat Baitulmal Aceh	821/140/SK/XI/2013	08 November 2013	Sudah	Sudah	Baitulmal.acehprov.go.id	Bustami Hamzah, SE.	Telp : 0651-7555595	
6	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh	555/074/SK/2013	11 November 2013	-		Bppd.acehprov.go.id	Drs.Bustami Usman,SH	Telp : 0651-24757	
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	555/1477/SK/2013	14 November 2013	-		Disbudpar.acehprov.go.id	Drs. Adami	Telp : 0651-26206	
8	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh	050/1741/11/SK/2013	15 November 2013				Reza Haryanto, SP		

NO	NAMA DINAS	SK TIM PPID Pembantu	Tanggal SK	DIP	IP MELALUI WEBSITE	WEBSITE	Penanggung jawab PPID/Koord.Pely	NO.KONTAK PERSON	KET
9	Dinas Kehutanan Aceh	800.5/32.a/PEG/2014	03 Februari 2014	sudah		Dishut.acehprov.go.id	Ir. Husaini Syamaun	Telp : 0651-42277	
10	Dinas Keuangan Aceh	893.05/036/2014	24 Maret 2014	-			Cut Aulia Fahmi		
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	SK/060/EP/2014	28 Maret 2014	-			Drs. Zulkarnaini,MPA		
12	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	954/053/2014	21 Mei 2014				Alfian Adami, SE, M.Si		
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh	KEP-036/K/S.U/2014	21 Juni 2014	Sudah			Drs. Fajar Wahyudin	Telp : 0651 26325 Fax : 0651 26324	
14	Dinas Perkebunan Aceh	800/691/II-2/SK-2014	07 Juli 2014	Sudah			Ir. T. Turmizi, M.Si	Telp : 0651-7552174 Fax : 0651-7552173	
15	Sekretariat Katibul Wali Aceh/ Keurukon Katibul Wali	954/10/2014	13 Agustus 2014	-			Cut Aja Muzita SSTP,MPA	Telp : 23114 Fax : 0651 7555790	
16	Dinas Bina Marga Aceh	27/KPTS/BM/2014	22 Sept 2014	Sudah		Tdk ada	Dedi Fahrnan, ST.MTP		

NO	NAMA DINAS	SK TIM PPID Pembantu	Tanggal SK	DIP	IP MELALUI WEBSITE	WEBSITE	Penanggung jawab PPID/Koord.Pely	NO.KONTAK PERSON	KET
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	480/214/SK/PPID-P/IX/2014	23 Sep 2014	Sudah			T.Nasruddin, SE	Telp.0651 21194 /33194 Fax. 0651 31858	
18	Badan Pengendalian Dampak lingkungan Hidup Aceh	660/064/2014	25 Sep 2014				Safrida Afriana, ST.P.G.Dipl.Sc.ME M		
19	Badan Investasi dan Promosi Aceh	570/BP/1544/SK/2014	29 Sep 2014				Febiyeni, SE		
20	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-		Sudah		bpba.acehprov.go.id			
21	Dinas Pendidikan Aceh	-		Sudah		info.tekkom-aceh.net			
22	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh	-		Sudah		dinkeswanak.acehprov.go.id			
23	Dinas Sosial Aceh			Sudah		dinsos.acehprov.go.id			
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk	560.470.2/928/2014	09-Mei-14			disnakermobduk.acehprov.go.id	T.Zulfikar, S.Sos	Telp.0651 42115 Fax.0651 46798	
25	Dinas Cipta Karya	339/KPTS/DCK/2014	22-Sep-14	-			Dina Feriana, ST, M.Eng.Sc	Telp.0651 42882, 41130 Fax. 0651 41130	
26	Dinas Kelautan dan Perikanan		27-Okt-14			dkp.acehprov.go.id	Zulkarnain Haiyar,SP,Msi	Telp.0651 229	
27	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan			Sudah					

KONDISI PPID KABUPATEN KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Status								Keterangan / Rekomendasi
		Perbup/Perwal	SK Penetapan PPID	Sosialis asi	Penguatan Kelembagaan					
					SOP	DIP	Meja Layanan Informas i	Dokumentasi Informasi	Penanggung Jawab	
1	Sabang	sedang pembahasan	042/467/2013 /25/09 / 2013	2014	2014	2014	sedang Proses	2014	Kadishubkominfo (Irawadi, SE, HP. 085277902100)	
2	Banda Aceh	Nomor : 16 Tahun 2013	260 tahun 2012/07/08/2 012	Juni 2012	Sudah	Sudah lengkap semua SKPK	Sudah lengkap	Sudah	Kadishubkominfo, Drs. Muzakkir, M.Si 08126907816	
3	Aceh Besar	draf	draf	belum	draf	belum	belum	belum	Kadis Hubkomintel. Mahdi effendi, 0811683808	
4	Pidie	Draf sudah ada	404 tahun 2013/ 02 /09 /2013	Belum/ 28 Novem ber 2013	Belum	Belum	sudah ada/berj alan	belum	Wabup (08126916149), Kadis 085260148214	
5	Pidie Jaya	sudah mulai disusun (draf sedang dikoreksi)	313 Tahun 2012/27/09/2 012	Apr-14	Draft sedang disusun	Apr-14	Sudah(di kominfo)	sedang dipersiapkan	Kadishubbudparko minfo, Ir. Mukhtar Ben Hasan 081360509007	sudah ada penanggung jawab disetiap SKPK untuk pengarsipan dokumen
6	Bireuen	Nomor, 17 Tahun 2014	602 tahun 2013/12/11 /2013	belum/ 2014	Draf sudah ada/201 4	belum	belum	belum	Kadis Raden Yus Rusmadi.ST (082368086659)	
7	Lhokseumawe	2014	430 tahun 2012/28/06/2 012	desemb er 2013	Draf sudah ada	Baru Internal (Situs)	Belum ada	sudah ada beberapa	Kadis HubParbud Drs. Ishaq Rizal. Msi (Hp.08212454853 0)	

No	Kabupaten/ Kota	Status								Keterangan / Rekomendasi
		Perbup/Perwal	SK Penetapan PPID	Sosialisasi	Penguatan Kelembagaan					
SOP	DIP				Meja Layanan Informasi	Dokumentasi Informasi	Penanggung Jawab			
9	Langsa	BELUM	503 TAHUN 2013/10/09/ 2013	2015	DRAF AWAL	16	BELUM	BELUM PDE	Kadiskominfo, Suriatno (085260182267)	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah
10	Aceh Timur	BELUM	550/710/2011 /25/04/2012 550/474/2013	BELUM	DRAF AWAL	BELUM	SUDAH	PROSES	Dishubkominfo (Ir.Zakaria.MM. Hp. 085262794035).	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah
11	Aceh Tamiang	NOMOR 14 TAHUN 2014	NOMOR 716 TAHUN 2014	09 DES 2014	DRAF AWAL	BELUM	BELUM	BELUM	KadishubKominfo (Hidayat)	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah
12	Aceh Tenggara	NOMOR 3 TAHUN 2013	180/161/2012/ 30/06/2012	JUNI 2012		BELUM	BELUM	BELUM	Kabag. Humas, Umardani. SH.MM (081262607642).	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah
13	Gayo Lues	-	-	BELUM	BELUM	BELUM	BELUM	BELUM	Kabag. Humas, Syafuruddin. S.Sos Hp. 082160179444	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah
14	Aceh Tengah	NOMOR : 24 TAHUN 2013 (27/07/2013)	SK NOMOR : 480/545/DISHU BKOMINFO/201 3 (28/06/2013) SK NOMOR : 480/595/DISHU BKOMINFO/201 3 INSTRUKSI	15 NOV 2014	BELUM	SUDAH	BELUM	BELUM	Zainuddin (085270175645)	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah

No	Kabupaten/ Kota	Status								Keterangan / Rekomendasi
		Penguatan Kelembagaan								
		Perbup/Per wal	SK Penetapan PPID	Sosi alisa s	SOP	DIP	Meja Layanan Informasi	Dokumentasi Informasi	Penanggung Jawab	
15	Bener Meriah	Nomor : 61 Tahun 2012	649 Tahun 2012	Mei 2012	Sedang Penyusun an	belum	digabung dengan UP3	Belum	Kadis Hubtelebudpar (Aswad.S.pd Hp. 081360039808.	
16	Subulussalam	Belum	188.45/065/2 011/08/09/20 11	sudah dua kali (Agustu s 2012 dan Novemb er 2013)	Belum	Belum	(Ruang kerja saat ini di Bidang Telemati ka)	belum	Kadishubtelpar. Anharudin.SH (085297890513)	Penguatan Teknis dari PPID Aceh (Bimtek, Penyusunan SOP, DIP, dll)
17	Aceh Singkil	Nomor : 14 Tahun 2013	138 Tahun 2013/19/07/2 013	Juni 2012	Menung gu Tandata ngan	18 SKPK	Sudah	Sudah	Kabag. Humas & Protokol, Drs. H. Roswin Hakim, M. Pd (081397305446),	Pengalokasian anggaran pada P- APBK TA 2013
18	Simeulue	Belum	210 tahun 2012 11/06/2012/ Masih akan direvesi	Juni 2012/S osialisa si Ulang	Belum	Belum	Tidak Berjalan	belum	Kadishubkomintel (Narmiadin.S.Sos. 081377013146	
19	Aceh Barat Daya	Belum	728 tahun 2013/18/10/2 013	belum/ 2014	Belum	belum	Belum	belum	Kadishubkominfo(H.Eddi Sumarjan.SE.MM, Hp.08126978193	
20	Aceh Selatan	Perbub No.20/2013.	501 Tahun 2013/01/08/2 013	2014	Belum	belum	Belum	belum	Kadishub, Erwiandi.S.Sos. M.Si (081320537900)	PPID Aceh memfasilitasi sosialisasi PPID kepada Pimpinan Daerah
21	Nagan Raya	SK No.489/60/Kpts/2 014	belum	belum	belum	belum	belum	Kominfo nagan raya 085260558369	ppid akan Fasilitasi percepatan
22	Aceh Barat	Perbub. No.71/2013. 06 November 2013.	555/409/2013 /10/10/2013	Novemb er 2013	Desemb er 2013	Belum	Perangka t sudah ada/ Operator	Belum	Dishubtel. T. Syahluna Polem. S.Sos, Hp. 085277236569.	1. Anggaran untuk PPID tidak ada, 2. Pengalokasian dana bisa diusahakan da APBN

Rekapitulasi Kegiatan FGD PPID kab/kota 2014

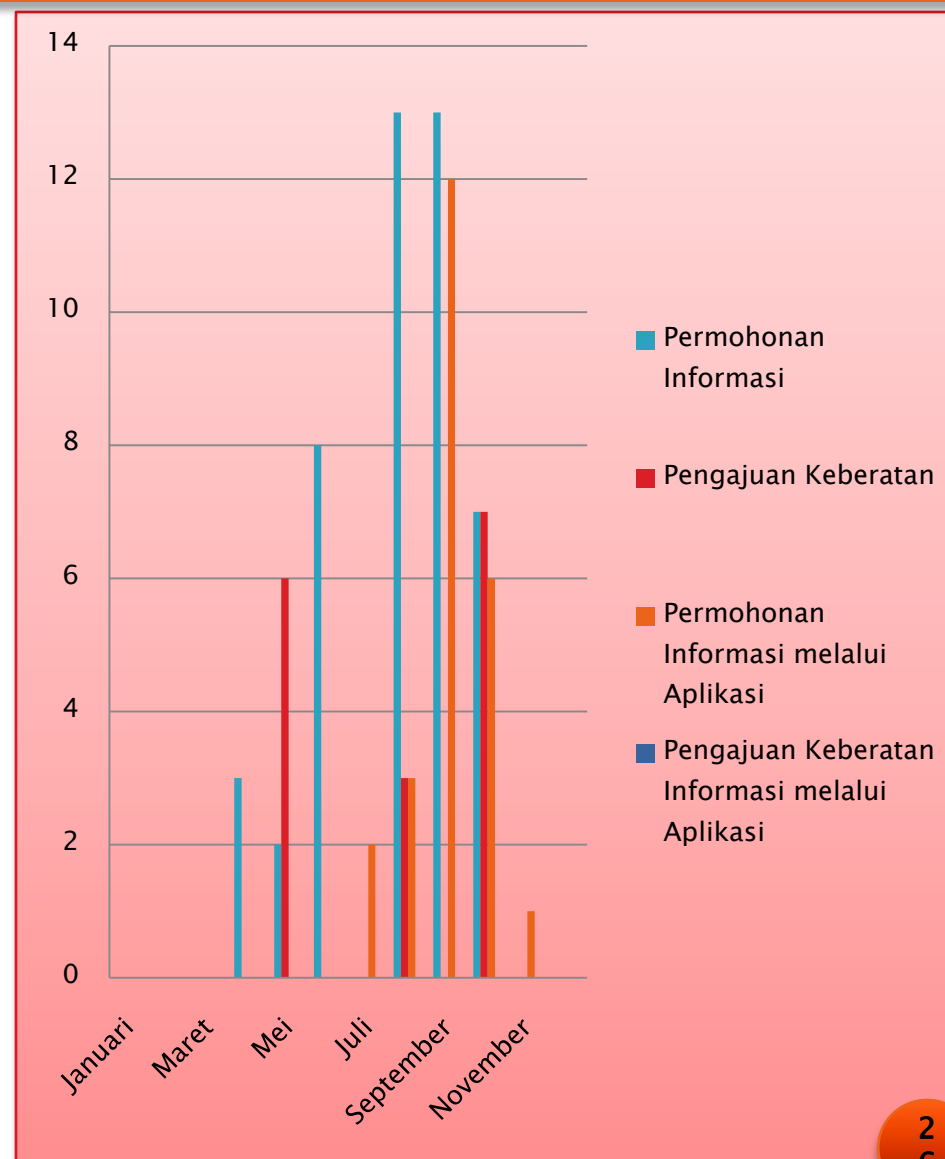
NO	KABUPATEN/KOTA	PANITIA DAERAH	JADWAL
1	KABUPATEN BIREUEN	Dishubudpar	25 Februari 2014
2	Kota Lhokseumawe	Dishubkominfo	12 Februari 2014
3	Kab. Aceh Utara	Humas	13 Februari 2014
4	Subulussalam	Dishubkominfo	3 April 2014
5	Kab Aceh Selatan	Dishubkominfo	4 April 2014
6	Kab Pijay	Dishubkominfo	17 April 2014
7	Kab. Aceh Tengah	Dishubkominfo	15 Agustus 2014
9	Kab. Aceh Barat	Dishubkominfo/Humas	25 Agustus 2014
10	Kab. Aceh Timur	Dishubkominfo	15 September 2014
12	Kab Tamiang	Dishubkominfo	19 Desember 2014

Rekapitulasi Forum PPID Kab/Kota 2014

- ▶ Forum PPID pertama – Banda Aceh, 4
Maret 2014
- ▶ Forum PPID Kedua – Takengon, 19 Juni
2014
- ▶ Forum PPID Tiga – Aceh Selatan, 18
Sept 2014
- ▶ Forum PPID Empat – Tamiang, 19 Des 2014

Rekapitulasi Permohonan, Keberatan Informasi di PPID Aceh Tahun 2014

No	Bulan	Permohonan Informasi	Pengajuan Keberatan	Permohonan Informasi melalui Aplikasi	Pengajuan Keberatan Informasi melalui Aplikasi
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	3	0	0	0
5	Mei	2	6	0	0
6	Juni	8	0	0	0
7	Juli	0	0	2	0
8	Agustus	13	3	3	0
9	September	13	0	12	0
10	Oktober	7	7	6	0
11	November	0	0	1	0
12	Desember	0	0	0	0
	Jumlah	46	16	24	0



DAFTAR JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2014

NO	TANGGAL BULAN	NAMA PEMOHON	JUMLAH PEMOHON	DIPEUHI	DITOLAK	DIPROSES	HARI/JAM	WAKTU PENERIMAAN INFORMASI DARI DINAS	ALASAN PENOLAKAN	KETERANGAN INFORMASI YANG DIMINTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15 April 2014	NENENG INDRIATI	3	√		√	-	-		1. Surat keputusan tentang SOP. 2. Peraturan Gubernur Pembentukan PPID Utama/Pembantu 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2014
2.	30 Mei 2014	BAIHAQI	2		√		-	-	Diteruskan Ketua Bawaslu Aceh	1. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KIP Aceh dan Bawaslu Aceh 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak oleh KIP Aceh dan Bawaslu Aceh
3	03 Juni 2014	BAIHAQI	6		√				Diteruskan ketua Komisi Indenpenden Pemerintah Aceh	1. Daftar isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) atau petunjuk operasional kegiatan (POK) KIP Aceh dan Bawaslu Aceh tahun anggaran 2013/2014 yg berkaitan Pemilu Legislatif/Pilpres 2014. 2. Dokumen kontrak pemenang pengadaan dan distribusi logistik pemilu di Aceh tahun 2014 terkait pengadaan kotak suara, bilik suara dan alat scan pungut hitung Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diadakan oleh KIP Aceh. 3. Surat perintah pelaksanaan pekerjaan, Surat penyelesaian pekerjaan dan Berita acara serah terima pekerjaan terkait pekerjaan kotak suara, Bilik suara dan alat scan pungut hitung untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diadakan oleh KIP Aceh.

NO	TANGGAL BULAN	NAMA PEMOHON	JUMLAH PEMOHON	DIPEUHI	DITOLAK	DIPROSES	HARI/JAM	WAKTU PENERIMAAN INFORMASI DARI DINAS	ALASAN PENOLAKAN	KETERANGAN INFORMASI YANG DIMINTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										4. Laporan berita acara penerimaan barang terkait logistik surat suara,tinta pemilu, template bagi tuna netra, Formulir C1 dan Hologram untuk Pileg 2014 yang diterima oleh KIP Aceh dari KPU Pusat.
										5. Daftar inventaris Asset yang dimiliki dan dikelola oleh KIP Aceh khususnya terkait asset bilik suara, kotak suara dan mesin scan pungut hitung dan juga asset yang dimiliki dan dikelola oleh Bawaslu Aceh.
										6. Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Aceh Tahun 2014.
4	09 Juni 2014	BAIHAQI	2		V			-	Diteruskan ke Dinas Kehutanan Aceh	1. Daftar Informasi Publik Dinas kehutanan Aceh. 2. Daftar Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan yang bergerak disektor HTI yang Beroperasi di Aceh
5	6 Agust. 2014	Muhammad Hidayat.S	4							1. LHP BPK RI atas laporan Keuangan badan publik tahun 2013 2. LHA Inspektorat badan informasi publik tahun pemeriksaan 2013 3. Standar biaya pengadaan barang/jasa dilingkungan Badan publik 2014 4. Dp.3 tahun 2013 dan 2014 dari seluruh pejabat Struktural dilingkungan badan publik

6	6 Agust. 2014	Muhammad Hidayat, S	3							1. Pemerintah alamat email resmi badan publik
										2. Profil singkat pejabat Struktural di badan publik
										3. LHKPN dan seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di badan publik
7	6 Agust. 2014	Muhammad Hidayat,S	4	V		V				1. Laporan layanan informasi publik tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang telah dibuat oleh PPID
										2.Surat Komisi Informasi pusat/provinsi perihal kewajiban mengumumkan dan menyampaikan Laporan pelayanan informasi publik.
										3. Surat Komisi Informasi pusat/provinsi perihal evaluasi dan saran dan masukkan pelayanan informasi publik
										4. Penjelasan tertulis hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi badan publik saat ini dalam melaksanakan kewajiban.
8	29 Agust.2014	Liza Dayani	2	V		V				1. Daftar informasi publik PPID Utama dan PPID pembantu tahun 2014
										2. Data mutakhir lengkap SK,SOP PPID Utama, pembantu dan Kabupaten/Kota
10	1 Sept 2014	Afwan Daya	4			V				1. APBD tahun 2014
										2. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Gubernur tahun 2013
										3. Audit hasil penggunaan anggaran PU tahun 2010-2013
										4. Daftar penerimaan Dana Hibah dari APBN tabun 2012-2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1 Sept. 2014	Andi Setiawan	3			V				1. Daftar Penerimaan Beasiswa dari Pemerintah Aceh Tahun 2012 - 2014
										2. Jumlah Anggaran Dana Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2012 - 2013
										3. Jumlah Dana Beasiswa yang telah tersalurkan Tahun 2012 - 2013
12	2 Sept. 2014	Afwan Daya	2			V				1. Jumlah Anak Yatim Penerima Beasiswa dari Pemerintah Aceh tahun 2012-2014
										2. Jumlah Uang yang diterima per Orang.
13	29 Sept 2014	Safaruddin, SH	4	V		V				1. Realisasi Program dari tahun 2010-2013
										2. Realisasi Anggaran dari tahun 2010-2013
										3. Mitra Kerja dari tahun 2010-2013
										4. Hasil Audit Inspektorat dari tahun 2012-2013
14	20 Oktr 2014	Safaruddin, SH	7			V				1. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2010-2013
										2. Data penguatan kelembagaan pegasramaan Gender dan Anak
										3. Dara Organisasi Perempuan yang telah dibina
										4. Data Bimbingan Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha
										5. Data ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera yang telah menerima peju- luhan
										6. Data kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender
										7. Data pelatihan Mubalighah

DAFTAR JUMLAH PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2014

NO	TGL SURAT	NAMA ATASAN PENGAJU KEBERATAN	JML KEBERATA N	DIPEN UHI YA/TD K	DI TOLAK	DIPROSE S	HARI/ JAM	HARI/TGL DIPROSES	ALASAN KEBERATAN	KET INFO YG DIMINTA	INSTANSI PENGGUNA INFO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12/05/2014	MUHAMMAD HS	6		-	-	-	04/08/14	Tidak terpantau Karena jaringan sedang perubahan system	1. Profil badan publik dan profil pejabat structural 2. LHKPN. 3. Alamat email resmi BP, 4. DIP, laporan pelayanan, 5. Rekapitulasi kegiatan, 6. Rekapitulasi anggaran	Bkpp,biro Biro umum PSI – Dishubkomintel aceh Ppid aceh Ppid aceh Ppid aceh
2	23/09/2013	ALFIAN	2	YA	-	YA	11.10 Wib	25/09/13	Tidak dipenuhi permintaan	1. Rincian bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRA yang bersumber dari APBA Tahun Anggran 2010 s.d 2013	
3	26/09/2014	MUHAMMAD HS	1	-	-	YA			Informasi tdk dipenuhi dan ditanggapi	Laporan Keuangan BUMD	Dirujuk ke BUMD di Aceh

NO	TGL SURAT	NAMA ATASAN PENGAJU KEBERATAN	JML KEBERATAN	DIPEN UHI YA/TDK	DI TOLAK	DIPROSES	HARI/ JAM	HARI/TGL DIPROSES	ALASAN KEBERATAN	KET INFO YG DIMINTA	INSTANSI PENGGUNA INFO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10/10/2014	MUHAMMAD HS	1	-	-				1. Tdk disediakan dan tdk diumumkan	1. laporan pertanggungjawaban anggaran Operasional Gubernur	Dirujuk ke Biro Terkait
6	10/10/2014	MUHAMMAD HS	2	-	-	-	-	-	1. info tdk disediakan dan diumumkan	1. laporan biaya operasional Gubenrur	Dirujuk ke Biro terkait
										2. laporan Operasional Wagub	Dirujuk ke biro terkait
7	16/10/2014	RUMOH TRANSPARANSI	4			YA	10.00 wib	24/10/2014	1. tdk direspon /ditanggapi permohonan info hingga 10 hr kerja	1. RKA dinas kelautan dan Perikanan 2012-2014	
										2. RKA Perubahan 2012-2014	Dirujuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan
										3. Rencana Kerja(Renja) Kelautandan Perikanan	
										4. Data Jumlah dan Sebaran TPI. PPI dan PPS di aceh	

Rekapitulasi Pengajuan Sengketa di Lingkungan SKPA dan Kab/Kota Tahun 2014

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
1.	012/II/KIA-PS/2014	Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK)	Pemerintah Kabupaten Bireun	Data Anggota DPR Kabupaten Bireun priode tahun 2004 - 2009 yang telah mengembalikan maupun yang belum mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).	Selesai melalui mediasi
2.	013/II/KIA-PS/2014	Trade Union Care Center (TUCC) Aceh	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Salinan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Aceh (DPA) tanggal 17 Oktober 2013. Salinan surat rekomendasi DPA kepada Gubernur Aceh setelah tanggal 17 Oktober 2014; Surat jawaban Gubernur Aceh tentang penolakan rekomendasi DPA hasil rapat tanggal 17 Oktober 2013; Salinan Berita Acara Rapat DPA tanggal 25 Oktober 2013. Salinan surat rekomendasi DPA kepada Gubernur Aceh setelah tanggal 25 Oktober 2014; Salinan Peraturan Gubernur Aceh tentang UMP tahun 2014.	Selesai melalui mediasi
3.	014/III/KIA-PS/2014	MaTa	DPW Partai Kebangkitan Bangsa	Rincian laporan keuangan partai tahun 2010, 2011 dan 2012 (yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBA) : - Rincian neraca dan laporan realisasi anggaran; - Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Rincian program umum dan kegiatan partai tahun 2010, 2011, dan 2012. Struktur dan kepengurusan partai yang berlaku saat ini.	Selesai melalui mediasi
4.	015/VIII/KIA-PS/2014	Gasak	Kabupaten Bireun	Data Anggota DPR Kabupaten Bireun priode tahun 2004 - 2009 yang telah mengembalikan maupun yang belum mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).	Selesai melalui mediasi

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
5.	016/VIII/K IA-PS/2014	Mata Umat	Pemerintah Aceh	Profil Badan Publik pada situs resmi badan publik berupa alamat email resmi badan public, profil singkat pejabat struktural di badan publik dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di badan publik	Selesai melalui adjudikasi
6.	017/VIII/K IA-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Sumatra Utara	Tidak dilaksanakan kewajiban Pasal 11 ayat (1) huruf B dan C PERKI SLIP.	Selesai melalui adjudikasi
7.	018/VIII/K IA-PS/2014	MaTa Umat	Pemerintah Provinsi Aceh	Tidak menyediakan dan tidak mengumumkan informasi pada situs resmi dan papan pengumuman di Kantor Komisi Informasi Sumatera Utara yaitu informasi tentang standard biaya dan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Selesai melalui adjudikasi
8.	019/VIII/K IA-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembar disposisi Ketua Komisi Informasi Pusat tertanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan Kepada Komisioner Gugus Tugas Percepatan Penanganan Sengketa Informasi, terkait pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi yang diduga dilakukan oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Saudara Anton Minardi, Saudara Mahi M. Hikmat dan saudara Anne Friday Safaria. b. Lembar disposisi Ketua Komisi Informasi Pusat tertanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan Kepada Komisioner Gugus Tugas Percepatan Penanganan Sengketa Informasi terkait pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi yang diduga dilakukan oleh Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat saudara Hermadi Natawijaya. c. Penjelasan tertulis mengenai alasan belum dilakukannya tindak lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi yang diduga dilakukan oleh 	Selesai melalui adjudikasi

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
9.	020/VIII/KI A-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	a. Penjelasan Tertulis mengenai status legal standing badan public BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Apakah sebagai badan publik Negara atau sebagai badan publik selain badan public Negara menurut UU KIP dan PERKI SLIP ? b. Penjelasan tertulis mengenai Informasi apa saja yang termasuk Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU KIP	
10	021/VIII/KI A-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	isinya ada sama Gusmardi, dapat diminta langsung sama gusmardi,,)	
11	022/VIII/KI A-PS/2014	LSM Gerak Aceh	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	a. Dokumen/Data Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Mineral dan Batubara yang diperoleh Kabupaten Aceh Besar, dari tahun 2010 s/d 2013. b. Dokumen/Data Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Minyak dan Gas yang diperoleh Kabupaten Aceh Besar, dari tahun 2010 s/d 2013. c. Dokumen/Data Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan perusahaan 1) PT. Piyeung Mining, 2) PT. Mountain Inti Tambang, 3) PT. Makmur Inti Tambang, 4) PT. Multi Mitra Raya, 5) PT. Bina Meukuta Alam, 6) PT. Sama Citra Agung, 7). PT. Tambang Indrapuri Raya dan 8) PT. Lhoong Setia Mining. d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi/Eksploitasi 1) PT. Piyeung Mining, 2) PT. Mountain Inti Tambang, 3) PT. Makmur Inti Tambang, 4) PT. Multi Mitra Raya, 5) PT. Bina Meukuta Alam, 6) PT. Sama Citra Agung, 7). PT. Tambang Indrapuri Raya dan 8) PT. Lhoong Setia Mining. e. Dokumen/Data Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan perusahaan (golden share) 1) PT. Piyeung Mining, 2) PT. Mountain Inti Tambang, 3) PT. Makmur Inti Tambang, 4) PT. Multi Mitra Raya, 5) PT. Bina	

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
12	023/VIII/KI A-PS/2014	LSM Gerak Aceh	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	<p>Dokumen/Data Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Mineral dan Batubara yang diperoleh Kabupaten Aceh Barat, dari tahun 2010 s/d 2013.</p> <p>Dokumen/Data Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Minyak dan Gas yang diperoleh Kabupaten Aceh Barat, dari tahun 2010 s/d 2013.</p> <p>Dokumen/Data Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan 16 perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini.</p> <p>Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi/Eksploitasi 16 perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini.</p> <p>Dokumen/Data Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan 16 perusahaan (golden share)</p>	Selesai melalui mediasi
13	024/VIII/KI A-PS/2014	MaTa Aceh	Dinas Kehutanan Aceh	<ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Aceh; b. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2012, 2013, dan 2014; c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2012, 2013, dan 2014; d. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2012, 2013 dan 2014; e. Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Perubahan Tahun 2012 dan 2013; f. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) - Perubahan Tahun 2012 dan 2013; g. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 dan Tahun 2013; h. Daftar izin yang masih berlaku bagi pemanfaatan hutan Aceh yang berisikan: <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat lengkap Perusahaan Pemegang Izin; - Nomor izin; - Lokasi izin; - Masa berlaku izin; - Luas wilayah dan peta konsesi; - Rencana Kerja Tahunan; 	Selesai melalui mediasi

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
15	026/VIII/KI A-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<p>a. Rekapitulasi Pelimpahan sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Kepada Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2011,2012,2013 dan 2014 yang memuat keterangan nama Pemohon, nama termohon, tanggal pelimpahan sengketa, dan alasan Pelimpahan sengketa</p> <p>b. Berkas sengketa sebagaimana poin 1 di atas (berkas lengkap)</p>	Selesai melalui adjudikasi
16	027/VIII/KI A-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<p>a. Rekapitulasi penanganan sengketa informasi public yang diajukan oleh pemohon ICW (Indonesia corruption Watch), KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran), pada tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014 yang memuat keterangan tanggal pemohon , tanggal registrasi Sengketa, tanggal penetapan MPP/MK/Mediasi,tanggal Ajudikasi, dan Tanggal penyampaian salinan putusan kepada pemohon</p> <p>b. Salinan dokumen penanganan sengketa Informasi Publik sebagai mana Poin 1 di atas, Berupa bukti/akta registrasi,bukti pengiriman registrasi Kepada pemohon, dan bukti penyampaian salinan putusan kepada pemohon.</p>	Selesai melalui adjudikasi
17	028/VIII/KI A-PS/2014	Rumoh Transparansi Aceh	Dinas Kehutanan Aceh	<p>Target, Realisasi dan rincian Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor kehutanan di Aceh tahun anggaran 2009-2014;</p> <p>Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Aceh tahun anggaran 2009-2014;</p> <p>Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kehutanan Aceh tahun anggaran 2009-2013;</p> <p>Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Aceh tahun anggaran 2009-2014;</p> <p>Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kehutanan Aceh tahun anggaran 2009-2013;</p>	Selesai melalui mediasi.

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
18	029/IX/KI A-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<p>a. Penjelasan tertulis, upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendorong setiap badan public tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota agar betul-betul patuh/taat didalam melaksanakan standar pelayanan Informasi Publik sesuai aturan Perki SLIP, khususnya ketaatan untuk memberikan pelayanan tepat waktu dan ketaatan untuk memberikan Informasi kepada pemohon secara benar, akurat dan lengkap.</p> <p>b. Dokumen yang memuat criteria dan hasil penilaian/scoring kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang menghasilkan pemeringkatan Badan Publik Terbaik Dalam keterbukaan Informasi Publik di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>c. Dokumen Penghargaan/sertifikat yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota kepada badan public tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam pemeringkatan badan public terbaik dalam keterbukaan informasi public pada tahun 2010 sampai dengan 2014.</p> <p>d. Dokumen pertanggung jawaban anggaran monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang menghasilkan pemeringkatan badan public terbaik dalam keterbukaan Informasi public di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya</p>	Selesai melalui mediasi

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
19	030/IX/KIA-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<p>a. Bahwa sebagai badan public, Komisi Informasi pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi public secara berkala melalui pemuatan informasi pada situs resmidan melalui pemampangan/penepelan informasi Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) perki SLIP.</p> <p>b. Bahwa informasi agenda kegiatan mediasi dan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi adalah informasi penting terkait pelaksanaan tugas Komisi Informasi dan termasuk jenis informasi publik yang wajib di umumkan secara berkala, sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b angka 6 perki SLIP</p> <p>c. Bahwa situs resmi Komisi Informasi Pusat dan situs resmi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, saat ini tidak memuat informasi sebagai mana poin 2 di atas.Begitupun, tidak ada pemampangan/penepelan informasi dimaksud pada papan pengumuman di kantor Komisi Informasi pusat dan kantor Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, informasinya sangat minim dan hanya memuat agenda yang sudah lewat,bukan agenda yang akan digelar (contohnya,situs resmi Komisi Informasi Pusat).</p> <p>d. Bahwa tindakan PPID Komisi Informaasi Pusat dan PPID Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik berupa agenda kegiatan mediasi dan ajudikasi non litigasi sengketa informasi public secara aktual dan komprehensip, adalah tindakan segaja melaikan kewajiban hukum,yang secara langsung berdampak merugikan publik, khususnya pengguna informasi.</p>	Selesai melalui adjudikasi nonlitigasi

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
20	031/IX/KIA-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<p>a. Print out daftar email masuk atau email diterima (inbox) pada alamat email resmi Komisi Informasi Pusat sekretariat@Komisi iinformasipusat.go.id, info@Komisi informasi.go.id dan setkip@gmail.com pada tahun 2013 dan 2014.</p> <p>b. Pint out daftar email keluar atau email terkirim (sent) pada alamat email resmi Komisi Informasi pusat sekretariat@Komisi iinformasi.go.id, info@Komisi iinformasi.go.id dan setkip@gmail.com pada tahun 2013 dan 2014</p> <p>c. Bukti registrasi permohonan PSI yang diajukan oleh perkumpulan sahabat Muslim Indonesia pada tanggal 7 Mei 2014, dengan pihak Termohon Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p> <p>d. Penjelasan tertulis, apakah berkas permohonan PSI sebagai mana Poin 3 di atas telah di sampaikan oleh Panitera Komisi Informasi pusat Kepada Ketua Komisi Informasi Pusat</p> <p>e. Penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat yang menetapkan Majelis Komisioner /Mediator yang menangani sengketa informasi sebagai mana Poin 3 di atas.</p> <p>f. Dokumen pertanggungjawaban anggaran/kegiatan Bimbingan Teknis Badan Publik Untuk Penerapan Standar Layanan Informasi publik, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat di Surakarta Jawa Tengah pada tanggal 22-23 Mei 2011 dan di Kupang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30-31 Mei 2011, Lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.</p>	
21	032/X/KIA-PS/2014	Mata Umat	Komisi Informasi Pusat	<p>a. Bukti Registrasi Permohonan PSI yang di ajukan oleh kelompok MATA UMAT pada tanggal 2 Juni 2014,dengan pihak termohon 25 badan public di Provinsi Banten dengan obyek sengketa profil badan public dan laporan keuangan.</p> <p>b. Penjelasan tertulis, apakah berkas permohonan PSI sebagaimana poin 1 atas telah di sampaikan oleh penitera Komisi Informasi Provinsi Banten kepada ketua Komisi Informasi Provinsi Banten</p> <p>c. Penetapan ketua Komisi Informasi Provinsi Banten yang menetapkan Majelis Komisioner/Mediator Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani sengketa informasi sebagaimana poin 1 di atas.</p> <p>d. Penjelasan tertulis, Kendala dan hambatan apa yang dihadapi oleh Komisi</p>	

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
22	033/X/KIA-PS/2014	Mata Umat	Pemerintah Aceh	<p>Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dibuat oleh PPID Pemerintah Aceh badan publik yang disampaikan kepada atasan PPID dan kepada Komisi Informasi Pusat / Provinsi serta diumumkan kepada publik melalui situs resmi badan publik.</p> <p>Surat Komisi Informasi Pusat/Provinsi yang disampaikan kepada dan diterima oleh Pemerintah Aceh perihal Kewajiban Mengumumkan dan Menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik, atau yang isinya memuat informasi/pemberitahuan mengenai adanya kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat / Provinsi, mengacu kepada ketentuan pasal 4 huruf j juncto pasal 36 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <p>Surat Komisi Informasi Pusat / Provinsi yang disampaikan kepada dan diterima oleh Pemerintah Aceh perihal Evaluasi dan/atau saran masukan Pelayanan Informasi Publik, atau yang isinya memuat informasi tentang evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat / Provinsi dan/atau saran masukan yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat / Provinsi kepada Pemerintah Aceh terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik oleh badan publik. Penjelasan tertulis, hambatan dan kendala apa saja yang di hadapi oleh badan public saat ini di dalam melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku? Khususnya terkait upaya badan publik untuk menghindarkan terjadinya komplain pelayanan (keberatan yang diajukan oleh pengguna/pemohon informasi) dan untuk menghindarkan terjadinya kasus sengketa informasi publik, baik litigasi maupun non litigasi.</p>	Masih dalam tahap penyelesaian
23	034/XI/KIA-PS/2014	Koalisi NGO HAM	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Anggaran yang disediakan dalam APBA Tahun Anggaran 2013 Untuk paket pengadaan pembangunan Kapal 40 GT. 2. Dokumen kontrak, PHO dan FHO beserta nama panitia tender. 3. Jumlah biaya perunit dan jumlah kapal yang selesai pengerjaannya serta telah diserahkan kepada masyarakat. 4. Nama-nama penerima manfaat kapal beserta alamat tempat tinggal. 5. Dokumen perencanaan paket pengadaan pembangunan kapal 40 GT. 	Sedang dalam proses persidangan

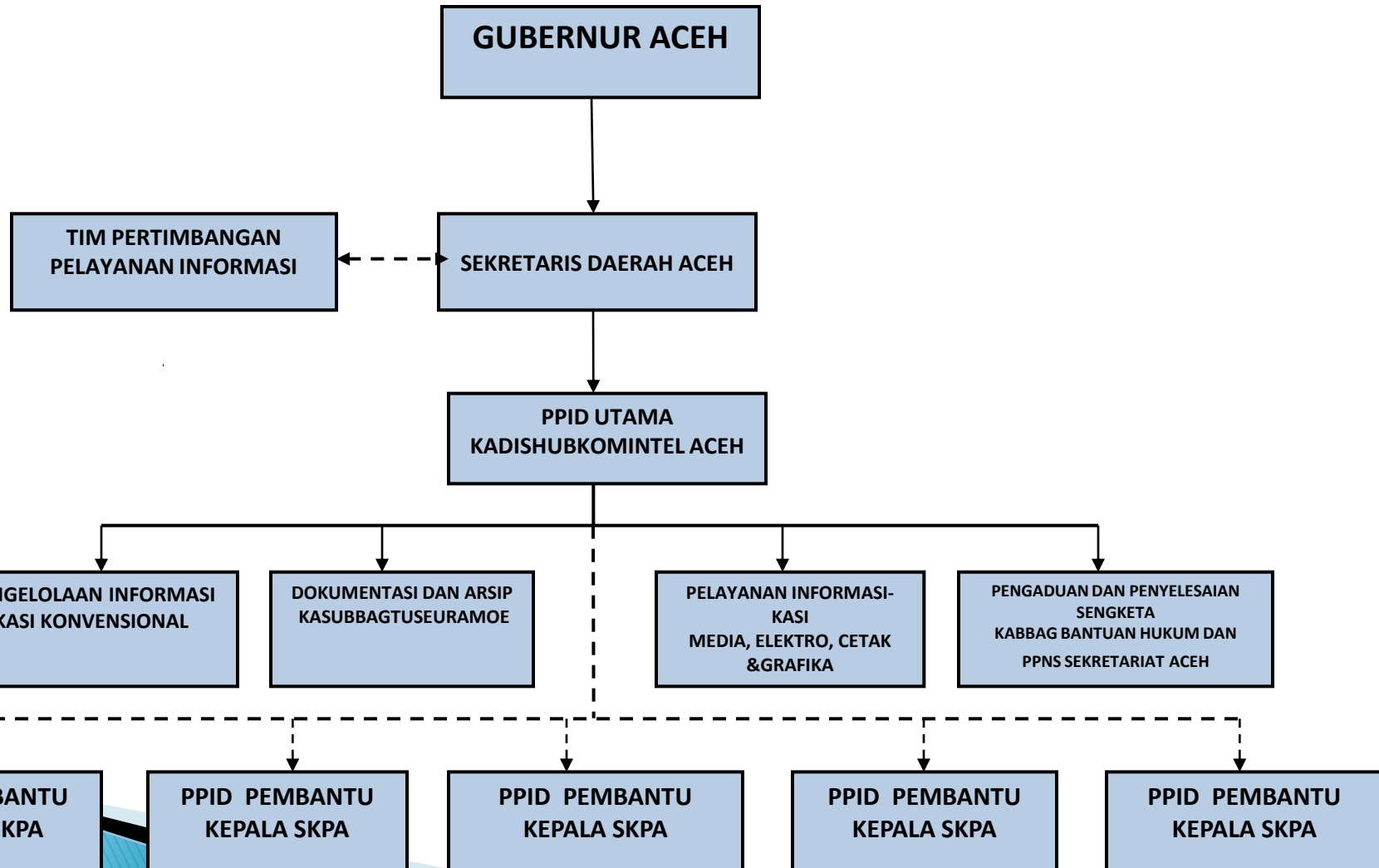
NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
24.	035/XI/KI A-PS/2014	LSM MaTA	Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh	A. Dok. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL): 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri. A. Surat Keputusan Izin Usaha: 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri. A. Izin Lingkungan: 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri. A. Surat Rekom Bupati/Gubernur/Menteri Kehutanan: 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri.	Sedang dalam proses persidangan
25.	036/XI/KI A-PS/2014	LSM MaTA	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh (BP2T)	A. Dok. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL): 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri. A. Surat Keputusan Izin Usaha: 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri. A. Izin Lingkungan: 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri. A. Surat Rekom Bupati/Gubernur/Menteri Kehutanan: 1. PT. Rencong Pulp and Paper Industri; 2. PT. Tusam Hustani Lestari; 3. PT. Mandum payah Tamita dan; 4. PT. Aceh Nusa Indrapuri.	Sedang dalam proses persidangan

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YG DIMINTA/DISENGKETAKAN	KETERANGAN
26.	037XII/KI A-PS/2014	RIZA ARAFIN	Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen/Data realisasi pengguna anggaran SPP tahun 2013 s/d 2014 di Universitas Teuku Umar; 2. Dokumen/Data realisasi pengguna anggaran KKN tahun 2013 di Universitas Teuku Umar; 3. Dokumen/Data realisasi pengguna anggaran operasional kampus tahun 2013 s/d 2014 di Universitas Teuku Umar; 4. Dokumen/Data realisasi pengguna anggaran ospek tahun 2013 s/d 2014 di Universitas Teuku Umar; 5. Dokumen/Data realisasi alokasi anggaran organisasi kampus tahun 2013 s/d 2014 di Universitas Teuku Umar; 6. Dokumen/Data hasil penetapan SPP mahasiswa 2013 s/d 2014 di Universitas Teuku Umar; 7. Dokumen/Data draf rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang terakhir di Universitas Teuku Umar; 8. Dokumen/Data realisasi anggaran gaji aparatur pegawai di Universitas Teuku Umar tahun 2013 s/d 2014. 	Sedang dalam proses persidangan
27.	038XII/KI A-PS/2014	RIZA ARAFIN	Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat	- Realisasi pengguna dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013 di SMA Sama Tiga di Kabupaten Aceh Barat.	Sedang dalam proses persidangan
28.	039XII/KI A-PS/2014	LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA)	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika /PPID Utama Kabupaten Aceh Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programkerja 100 hari Bupati Aceh Timur 2012/2013; 2. Hasil laporan kerja 100 hari Bupati Aceh Timur 2012/2013; 3. Hasil Audit BPK. APBK Aceh Timur Anggaran 2012/2013' 4. Laporan dana Hibah dan Bansos dari Kementerian Sosial tahun 2014. 	Sedang dalam proses persidangan
29.	040XII/KI A-PS/2014	LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA)	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika /PPID Utama Kabupaten Aceh Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Proyek Swakelola Dinas Pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK tahun 2012 dan 2013; 2. Laporan Progres Proyek Swakelola SD, SMP, SMA, SMK tahun 2012 dan 2013; 3. Data Penerima Dana BOS Tahun 2013 dan 2014 untuk sekolah SMK dan SMA; 4. Laporan Pertanggung jawaban diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk rencana dan laporan realisasi anggaran dana BOS tahun 2013 dan 2014 untuk SMK dan SMA. 	Sedang dalam proses persidangan

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2015

1. RAKORNIS SKPA
2. PELUNCURAN APLIKASI PPID
3. PENDAMPINGAN/ASSESMANT UTK Penguatan KELEMBAGAAN PPID PEMBANTU SKPA
4. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PPID SKPA
5. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PPID KAB/KOTA
6. BIMTEK REPORTASE BAGI PENGELOLA MC DAERAH DAN PPID KAB/KOTA
7. SOSIALISASI DAN ADVOKASI Penguatan PPID KAB/KOTA
8. RAKORNIS BAGI PPID SE-ACEH
9. FORUM PPID SE-ACEH SECARA REGULER/ TRI WULAN
10. EVALUASI YANG DILAKUKAN OLEH KIA

STRUKTUR PPID ACEH



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014



RAKORNIS SKPA



RAKORNIS KABUPATEN/KOTA





FGD PPID KAB/KOTA 2014



Nagan Raya



Aceh Timur



Subulussalam



Aceh Besar

FGD PPID KAB/KOTA 2014



Pidie Jaya



Aceh tengah



Lhokseumawe



Aceh Selatan

BIMTEK PPID SKPA TANGGAL, 12 SD 14 AGUSTUS 2014



BIMTEK PPID KAB/KOTA TANGGAL 12 SD 14 MEI 2014



FORUM PPID KAB/KOTA SE-ACEH 2014



Kota Banda Aceh



Aceh tengah



Aceh Selatan



Aceh Tamiang

RAKORNIS PPID SE-KALIMANTAN BARAT



BIMTEK REPORTASE BAGI PPID DAN MEDIA CENTER SE-ACEH, TGL, 14 sd 16 Okt 2014

